

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata Patriarki berasal dari bahasa Yunani (πατριάρχης) yang memiliki arti ayah yang memerintah atau mengatur keluarga. Patriarki dalam pengertian itu tidak memiliki konotasi dominasi ataupun kekuasaan untuk melakukan penindasan.¹ Patriarki hanya digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi di mana pihak laki-laki (ayah) menjadi kepala atau pemimpin dalam rumah tangga.

Meski demikian, setelah munculnya gerakan pembebasan perempuan, kata Patriarki diidentikkan dengan budaya yang berkembang di masyarakat yang menindas perempuan, menomor-duakan perempuan bahkan memarjinalkan perempuan. Sylvia walby menyatakan bahwa Patriarki merupakan suatu sistem di mana pria mempunyai kekuasaan yang lebih besar, menekan, serta memanfaatkan wanita dalam struktur sosial serta praktiknya.² Pengertian serupa juga dapat ditemui dalam KBBI yang mengartikan Patriarki sebagai suatu sikap mengutamakan pria dari pada wanita dalam masyarakat maupun kelompok sosial tertentu.³

Konsep Patriarki demikian tampaknya mempengaruhi para akademisi yang peduli dengan keterpurukan yang dialami oleh perempuan. Beberapa akademisi melakukan penelitian di Indonesia berusaha untuk membuktikan bahwa budaya Patriarki merupakan penyebab utama keterpurukan perempuan tersebut. Feminisme meyakini mengakarnya budaya Patriarki di Indonesia sebagai penyebab hilangnya perempuan sebagai bagian dari proses sejarah di Indonesia

¹ Bob Pierik, "Patriarchal Power as a Conceptual Tool for Gender History," *Rethinking History* 26, no. 1 (2022): 71–92, <https://doi.org/10.1080/13642529.2022.2037864>.: 74

² Siti Azizah et al., *Kontekstualisasi Gender, Islam Dan Budaya*, ed. Siti Aisyah Kara, I. (Makassar: Alauddin University Press, 2016). : 1.

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring - Patriarki," *Kbbi.Kemdikbud.Go.Id*, last modified 2016, accessed October 25, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patriarki>.

dan ditundukkan menjadi *the other*. Bambang Purwanto menjelaskan hal tersebut melalui disertasi Abdurrachman Suryomihardjo yang memberikan contoh Untuk menjelaskan pembangunan sosial di Yogyakarta yang terkesan hanya berfokus pada partisipasi laki-laki, sejarawan Darsiti Soeratman juga menggunakan tulisan perspektif laki-laki tentang kehidupan sekuler Keraton Surakarta pada tahun 1930-an. 'Berbeda, Djuliaty Suroyo tidak membahas homoseksualitas secara individual. persoalan angkatan kerja pada masa tanam paksa di Kedu. Selain itu, Asvi Warman Adam juga menegaskan dalam penuturan Bambang Purwanto bahwa tulisan tiga sejarawan tersebut dipertanggungjawabkan oleh seorang ahli sejarah senior yang telah lama mengabdikan dirinya di bidang sejarah, yaitu Sartono Kartodirdjo. Itulah sebabnya Bambang Purwanto mengambil kesimpulan demikian, “baik secara sadar maupun tidak, realitas histories perempuan telah diabaikan sebagai bagian dari proses sejarah Indonesia”.⁴

Hal serupa juga tergambar dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh ayu rahmawati yang menjelaskan terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di ruang lingkup pesantren disebabkan karena mengakarnya budaya Patriarki. Salah satu penyebab mengakarnya budaya Patriarki ialah tidak adanya atau tidak ditemukannya pengarang kitab kuning dari pihak perempuan. Ketiadaan itu menyebabkan kesalahan interpretasi dalam memahami ajaran agama yang dianggap tidak menguntungkan bagi pihak perempuan dan lebih menguntungkan pihak laki-laki. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan, termarginalnya santri perempuan hingga terjadinya tindakan pelecehan seksual.⁵

⁴ R. Indiah Rahayu, *Konstruksi Historiografi Feminisme Indonesia Dari Tutar Perempuan* (Yogyakarta, 2007). : 1.

⁵ Ayu Rahmawati, “Resiliensi Santri Korban Sexual Harassment Oleh Pengasuh Pesantren (Analisis Dampak Psikologis Perempuan Dalam Bingkai Pesantrendan StereotypePatriarki),” *Aflah Consilia: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 1, no. 2 (2023): 64–74, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/aflah/article/view/866>.

Dalam tingkat ekstrim akan adanya pemahaman bahwa budaya Patriarki merupakan budaya yang tidak memiliki keadilan terhadap perempuan bahkan harus ditinggalkan juga terjadi dalam penelitian yang mengkritik penafsiran terhadap ajaran agama terdahulu yang dianggap tidak lagi cocok dengan kondisi masyarakat saat ini. Dalam bukunya *Al-Qur'an Menolak Patriarki*, Adrika Fitrotul Aini mengkritik penafsiran agama hingga ketingkat kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Menurutnya pemahaman yang meyakini bahwa laki-laki merupakan pemimpin dalam rumah tangga berdasarkan Q.S. An-Nisa: 34 merupakan pemikiran primitif-primordialistik yang sangat pro Patriarkhal karena penafsiran tersebut memberikan otoritas penuh bagi laki-laki (suami) untuk memberikan perintah maupun larangan bagi perempuan. Sehingga para penafsir modern perlu untuk melakukan penafsiran ulang atas ayat tersebut.⁶

Beberapa penelitian tersebut merupakan sedikit dari sekian banyak bukti penelitian yang dilakukan para akademisi feminis untuk menjelaskan bahwa budaya Patriarki merupakan budaya yang “tidak kondusif” bagi eksistensi perempuan. Adanya stereotip negatif terhadap budaya Patriarki tersebut tentu menjadi suatu hal yang urgen untuk dikaji ulang. Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia menggunakan budaya Patriarki.⁷ Terlebih sebanyak 244,41 juta atau sekitar 87,1% penduduk Indonesia memeluk agama Islam pada akhir tahun 2023.⁸ Dengan demikian, sebanyak 87,1% penduduk Indonesia menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model dalam berbudaya.⁹

⁶ Adrika Fithrotul Aini, *Al-Qur'an Menolak Patriarki Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender*, ed. Agus Sulton, I. (Malang: Madza Media, 2022): 134-135

⁷ Lihat dalam Bab VI Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yang menjelaskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga.

⁸ “Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Pada 2023 - DataIndonesia.Id,” accessed May 13, 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-2023>.

⁹ Lihat Q.S. Al-Ahzab (33): 21.

Pada masa Pra-Islam, budaya *Patriarchal-agnatic*¹⁰ merupakan dasar kesatuan keluarga masyarakat Arabia. Dalam bingkai budaya *Patriarchal-agnatic*, perempuan Arab pra Islam mengalami perlakuan buruk mulai dari keberadaannya yang dianggap aib hingga praktik pembunuhan bayi perempuan. Meski demikian, Islam justru memperkuat *patriarchal-agnatic* dengan melarang zina, melarang perkawinan poliandri dan mengancam perceraian bahkan memperjelas hubungan nasab ayah.¹¹ Kehadiran Islam memberikan warna baru terhadap budaya *patriarchal-agnatic* yang telah digunakan oleh masyarakat Arab. Kehadiran Islam juga mengangkat derajat perempuan dengan mengembalikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan, salah satunya adalah hak waris atau hak atas kepemilikan benda.¹²

Memperkuat budaya Patriarki yang diterapkan bukan karena masyarakat Arabia hanya mengenal atau hanya terdapat budaya Patriarki saja. Pada masa tersebut juga terdapat praktek perkawinan poliandri dengan Tingkat kepermanenan dan pertanggungjawaban keturunan termasuk juga di dalamnya adalah “perkawinan sementara” juga dikenal di lingkungan masyarakat Arabia pra-Islam. Jika mengacu pada apa yang telah nabi Muhammad lakukan terhadap budaya masyarakat Arab pra-Islam tersebut, maka dapat dipahami bahwa penguatan budaya patriarki sejatinya tidak bertujuan untuk menimbulkan penindasan terhadap perempuan, menomor-duakan perempuan terlebih memarjinalkan perempuan.

Selain itu, munculnya sebuah artikel berjudul “Kemunculan Kepala Daerah Perempuan dan Paradoks Kesetaraan Gender di Banten” menjadi stimulan untuk melakukan kajian ulang mengenai keterkaitan budaya patriarki terhadap terpuruknya eksistensi perempuan. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Banten

¹⁰ Ira. M Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam; Penerjemah, Gufron A. Mas'adi*, 1 (2). (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000). Suatu sistem di mana sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki keturunan secara langsung akan masuk kedalam garis keturunan leluhur laki-laki dan berada di bawah dominasi seorang kepala rumah tangga laki-laki atau laki-laki yang lebih tua.

¹¹ Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam; Penerjemah, Gufron A. Mas'adi*.: 43.

¹² Lihat Q.S. An-Nisa (4): 12.

mendapatkan momentum di mana porsi kepemimpinan daerah antara laki-laki dan perempuan melalui pilkada setara, dimana separuh dari 8 kabupaten / kota ditempati oleh pihak perempuan. Meski demikian hal tersebut tidak dapat secara otomatis menyelesaikan persoalan berbagai ketimpangan yang terjadi di beberapa sektor. Pendidikan misalnya, terjadi perbedaan antara peserta didik laki-laki dan perempuan dalam tingkat rata-rata lama sekolah (RLS) dengan perbandingan laki-laki dengan rata-rata 8,90 tahun sedangkan perempuan berada disekitar 7,82 tahun. Begitu pula yang terjadi dengan upah tenaga kerja laki-laki yang berbeda dengan perempuan dengan rasio 0,83%.¹³

Hal tersebut menunjukkan bahwa istilah Patriarki tidak sesuai untuk dianggap sebagai sumber terjadinya keterpurukan perempuan. Penggabungan antara Patriarki dengan dominasi laki-laki terhadap perempuan terlebih sebagai sebab penomorduaan laki-laki terhadap perempuan merupakan kekeliruan universalitas. Menurut Butler (1999), “Urgensi feminisme untuk menetapkan status universal bagi patriarki untuk memperkuat penampilan klaim feminisme sendiri sebagai perwakilan kadang-kadang telah memotivasi jalan pintas menuju universalitas kategorial atau fiktif dari struktur dominasi, yang diadakan untuk menghasilkan pengalaman umum perempuan yang ditundukkan”.¹⁴

Kerancuan istilah Patriarki tersebut kemudian dapat menyebabkan kerancuan berfikir logis untuk menangkap permasalahan sesungguhnya dan kemudian berakibat kesalahan untuk menyebutkan faktor utama terjadinya diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Dalam rumah tangga misalnya, terjadi sebuah kasus di mana suami tidak memberikan nafkah untuk istrinya karena pendapatan yang didapat suami dikuasai oleh ibunya (menurut pemahaman penulis suami diarahkan oleh ibunya untuk tidak memberikan

¹³ Mahpudin, “Kemunculan Kepala Daerah Perempuan Dan Paradoks Kesetaraan Gender Di Banten,” *Timesindonesia*, last modified 2020, accessed February 2, 2024, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/278584/kemunculan-kepala-daerah-perempuan-dan-paradoks-kesetaraan-gender-di-banten>.

¹⁴ Pierik, “Patriarchal Power as a Conceptual Tool for Gender History.”: 75.

nafkah sebagai “hukuman” bukan berarti semua pendapatan suami diambil oleh ibu hingga suami tidak memiliki uang di tangannya). Hal tersebut dilakukan oleh pihak ibu dari suami karena istri jarang memasak dan tidak pernah membersihkan rumah. Mengalami kondisi tersebut lantas sang istri menyematkan kondisi tersebut dengan Patriarki.¹⁵

Dalam Islam adanya pembebanan kepada laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga¹⁶ merupakan sebab diwajibkannya pemberian nafkah dari suami kepada istri dan anggota keluarganya. Sehingga tidak memberikan nafkah kepada istri merupakan hal yang sangat dilarang. Meskipun sebenarnya konsep nafkah dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas, dalam arti tidak hanya sekedar nafkah dalam bentuk uang. Selain kesalahan tindakan oleh pihak suami – dalam artikel tersebut –, kesalahan logis juga terlihat dari pihak istri. Patriarki dan pemberian nafkah kepada istri merupakan sebab dan akibat. Karena Islam menjadikan suami sebagai pemimpin rumah tangga maka suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Jika suami tidak memberikan nafkah maka itu bukanlah Patriarki dalam Islam.

Dengan demikian, Pemahaman yang baik terhadap agama merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia agar tidak memberikan nilai-nilai yang buruk ke dalam suatu budaya karena agama memiliki dimensi yang beragam¹⁷, termasuk di dalamnya dimensi nilai-nilai. Dengan dimensi inilah, agama memiliki peran yang besar untuk masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi. Sehingga agama tidak hanya dipandang sebagai aspek ideologi semata, melainkan termasuk di dalamnya aspek budaya. Hal ini seiring dengan apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz yang secara eksplisit mengatakan, bahwa

¹⁵ alga, “Inilah Sosok Agus, Caleg Yang Istrinya Ngamuk Ke Mertua, Mengaku Harta Dikuasai Sampai Gadaikan Emas.,” *Jatim.Tribunnews*, last modified 2024, accessed February 2, 2024, <https://jatim.tribunnews.com/2024/01/19/inilah-sosok-agus-caleg-yang-istrinya-ngamuk-ke-mertua-mengaku-harta-dikuasai-sampai-gadaikan-emas?page=4>.

¹⁶ Lihat Q.S. An-Nisa (4): 34

¹⁷ Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama Dalam Interaksi Sosial* (Jakarta: Kencana, 2017). 1.

“agama adalah inti kebudayaan yang menjadi acuan bagi kehidupan manusia, yang menjadi panduan penjelasan mengenai dari mana manusia berasal, untuk apa ia hidup di dunia, dan akan kemana ia pergi setelah meninggal.”¹⁸

Dalam eksistensialisme Muhammad Iqbal, kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum atau syari’at merupakan tahap pertama yang harus dilakukan manusia dalam bereksistensi.¹⁹ Sehingga dalam kaitan nafkah, bagaimanapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam rumah tangga, nafkah harus tetap diberikan sebagai bentuk ketataan ego untuk menjadi manusia sempurna (Insan Kamil). Adapun untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam berumah tangga, suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dituntut untuk mendalami nilai-nilai dalam agama agar dapat diaplikasikan dalam setiap persoalan.

Dengan adanya stereotip negatif terhadap budaya Patriarki yang berpotensi dapat menyebabkan kekeliruan dalam menyikapi permasalahan, terlebih masyarakat Indonesia sebagian besar masih menggunakan budaya Patriarki dalam rumah tangga maka penelitian ini dianggap perlu untuk dilakukan guna meninjau ulang kesalahan praktik yang disematkan kepada budaya Patriarki dan budaya Patriarki yang dianggap sebagai budaya anti perempuan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan situasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini:

- a. Budaya Patriarki merupakan bahasan yang selalu muncul dalam setiap penelitian gender. Penelitian-penelitian gender yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup baik pihak laki-laki maupun perempuan. Namun sejauh ini penelitian lebih banyak berfokus kepada perempuan

¹⁸ A. Fedyani Saifuddin, “Agama Dalam Pendekatan Sosial Budaya: Dari Positivisme Ke Konstruktivisme,” in *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama Dalam Interaksi Sosial* (Jakarta: Kencana, 2017), vi.

¹⁹ Mohammad Iqbal, *Asrar-i Khudi Rahasia-Rahasia Pribadi*, ed. Bahrum Rangkuti, 3rd ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). 46.

dengan mengkritik budaya Patriarki yang berkembang di masyarakat. Sehingga memunculkan stereotip negatif terhadap budaya Patriarki. Budaya Patriarki diidentikkan dengan dominasi laki-laki, memarjinalkan serta merugikan perempuan.

- b. Berlandaskan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ayu rahmawati yang menyebutkan ketiadaan penulis kitab kuning dari pihak perempuan dapat mengakibatkan munculnya dominasi laki-laki yang kemudian menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pesantren dan Mahpudin yang menjelaskan paradoks kepemimpinan perempuan dengan data mengenai pendidikan dan upah kerja seperti dijelaskan dalam pendahuluan. Dari kedua penelitian tersebut mengindikasikan terjadinya bias penelitian dalam memahami suatu peristiwa dikarenakan stereotip negatif terhadap budaya Patriarki.
- c. Banyaknya penelitian mengenai budaya patriarki dan eksistensi wanita namun belum ditemukan pembahasan yang komprehensif-konstruktif mengenai budaya Patriarki yang membuka ruang baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk tetap dapat bereksistensi sejalan dengan yang dilakukan Muhammad Saw.

C. Batasan Masalah

Agar mendapatkan kajian yang lebih terfokus terkait identifikasi dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini akan dibatasi pada batasan masalah sebagai berikut:

- a. Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ajaran atau nilai yang berlandaskan ayat-ayat Al-Qur'an dan atau berasal dari hadis Nabi Muhammad baik perkataan maupun perbuatan. Dengan luasnya cakupan dari ajaran dalam Islam maka dalam penelitian ini akan dipersempit cakupannya yakni terkait peran dalam Islam
- b. Kebebasan eksistensi muslim dalam penelitian ini mengacu pada eksistensialisme bercorak teistik yang di gagas oleh Muhammad Iqbal.

- c. Universalitas merupakan kata serapan dari kata *universality* yang memiliki arti “fakta dilakukan oleh atau melibatkan semua orang di dunia atau dalam kelompok tertentu; fakta menjadi benar atau benar setiap saat dan di semua tempat”.²⁰ Sehingga dalam penelitian ini universalitas yang dimaksud adalah keumuman konsep budaya patriarki yang dapat diterapkan kepada semua orang atau kelompok yang menggunakan budaya patriarki serta menganggap konsep patriarki tersebut benar dalam setiap saat dan di semua tempat.
- d. Budaya Patriarki dalam kajian ini bersifat bebas-terikat. Bebas berarti tidak terbatas pada satu arti, baik menurut arti dalam berbagai kamus maupun istilah menurut para ahli. Namun tetap terikat pada pembahasan terkait pokok permasalahan dalam penelitian. Menurut Sylvia Walby budaya Patriarki memiliki dua bentuk yaitu *Private Patriarchy* (Patriarki Domestik / Patriarki yang terjadi di ruang lingkup rumah tangga) dan *Public Patriarchy* (Patriarki Publik).²¹ Maka dalam penelitian ini akan dibatasi dalam pembahasan Patriarki Domestik. Dengan alasan: *Pertama*, dimensi nilai dalam Islam yang paling utama terkait kajian ini adalah menjaga diri sendiri dan keluarga dari Neraka (Q.S. 66:6), sehingga untuk memulai eksistensi di ranah publik akan selalu diawali dengan eksistensi di ranah keluarga. *Kedua*, Sylvia menjelaskan bahwa keluarga merupakan pusat kehidupan perempuan dan penentuan ketidaksetaraan gender. Keluarga dipandang sebagai pilar stabilitas dan fundamental dalam tatanan sosial, terlepas hal tersebut baik atau buruk bagi perempuan²².

²⁰ “Kata Benda Universalitas - Definisi, Gambar, Pengucapan Dan Catatan Penggunaan | Oxford Advanced Learner’s Dictionary Di OxfordLearnersDictionaries.Com,” accessed July 6, 2024, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/universality?q=universality>.

²¹ Andy Omara, “Perempuan, Budaya Patriarki Dan Representasi,” *Mimbar hukum* 2 (2004), <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:142909998>. 149.

²² Silvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, Reprinted. (Cornwall: T. J. Press Ltd, 1991).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul, latar belakang dan indentifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah budaya patriarki dalam Islam termasuk dalam universalitas konsep budaya patriarki yang mendominasi kebebasan perempuan?
- b. Bagaimana relasi Islam dan kebebasan eksistensi muslim di ranah domestik?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab setiap rumusan masalah dengan batasan-batasan yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan penelitian ini jika dirinci ialah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan ketidaksesuaian universalitas konsep budaya patriarki yang mendominasi kebebasan perempuan dalam Islam.
- b. Menjelaskan relasi antara Islam dan kebebasan individu muslim di ranah domestik.

F. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai kajian sekaligus pembuktian kesalahan stereotip negatif terhadap budaya Patriarki terkait eksistensi perempuan. Sehingga kajian gender selanjutnya tidak bersifat bias informasi dan menuju pada akar permasalahan yang sesungguhnya dengan tetap memperhatikan konsekuensi timbal balik atas saran-saran hasil kajian tersebut.

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi baik bagi civitas akademika maupun para aktivis yang berfokus mengenai gender, khususnya terkait budaya Patriarki dan eksistensi perempuan dalam bingkai keislaman. Penelitian ini juga berguna sebagai landasan untuk membuka pemikiran logis masyarakat mengenai fenomena-fenomena yang terjadi disekitar terutama mengenai persoalan eksistensi perempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian ataupun penelitian akan selalu bersifat berkelanjutan atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya baik bersifat pendalaman lebih lanjut ataupun bersifat jawaban atas perbedaan pandangan. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu terkait penelitian ini:

Pertama, Amunga Noel Caroline dan Ahaya Lukes Ochieng, “*Society, Patriarchy and the Church in the Subjugation of the Woman in Worship: The Case of Trousers in Kenya*”. *International Journal of Research in Education and Social Sciences (IJRESS)*, 2018. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena dimana perempuan diharuskan untuk menggunakan celana panjang dalam beribadah di Gereja. Keharusan tersebut disebabkan oleh sistem Patriarki yang digunakan masyarakat setempat lalu dilanggengkan oleh penafsiran Al-Kitab yang keliru oleh pihak Gereja. Beberapa faktor yang menjadi kekeliruan pemahaman pakaian yang seharusnya dipakai oleh wanita disebabkan beberapa faktor yakni kuatnya budaya patriarki di Kenya, tidak adanya penulis Al-Kitab dari pihak perempuan serta minimnya kepemimpinan dari pihak perempuan di Gereja Mumias²³. Dalam kajian ilmiah tersebut terindikasi adanya bias publikasi, khususnya pembahasan mengenai *Church’s Understanding of the Bible on Women Adornment*. Di dalam pembahasan tersebut tidak ditemukan adanya kutipan dari ahli agama untuk mewakili perbedaan pandangan amunga dan ochieng terhadap apa yang dipahami oleh pihak Gereja di Kenya. Bias konfirmasi juga terindikasi dalam kajian tersebut. Bias ini terlihat dengan tingginya intensitas penekanan kalimat kurangnya atau ketiadaan kehadiran perempuan serta data yang ditampilkan terkait hal tersebut untuk menjelaskan penyebab terjadinya penindasan terhadap perempuan dalam setiap penjelasan kajian.

²³ A. L. Amunga, N. C., and Ochieng, “Society, Patriarchy and the Church in the Subjugation of the Woman in Worship: The Case of Trousers in Kenya.,” *International Journal of Research in Education and Social Sciences (IJRESS)* 1 (1) (2018): 14–18.

Kedua, M. Khamim, “*MURSYID PEREMPUAN DALAM TAREKAT (Studi Kepemimpinan Perempuan dalam Tarekat Naqsyabandiyah Mazhariyah di Madura)*”, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2019. Kajian ini berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena yang keluar dari aturan umum di dalam thoriqah (Al Mizan al Kubra juz II halaman 189) yang mengharuskan laki-laki sebagai syarat untuk menjadi seorang mursyid²⁴. Tesis ini membuktikan bahwa perempuan yang memiliki kompetensi tetap dapat bereksistensi di arena publik yang menggunakan sistem Patriarki. Meskipun masih terdapat beberapa ketentuan seperti tidak dapat mengangkat Mursyid dan hanya menjadi Mursyid di kalangan Perempuan saja, namun posisinya sebagai Mursyid perempuan tetap diakui.

Ketiga, Bernadetta Pravita Wahyunintyas, “*SPA: Arena Resistensi Wanita Karier Atas Dominasi Patriarki*”, Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008. SPA bukan hanya sebagai tempat untuk perawatan tubuh melainkan juga sebagai tempat untuk melepas penat baik tubuh maupun pikiran. Sehingga perawatan tubuh di SPA tidak hanya membuat tubuh lebih terawat melainkan juga membuat pikiran menjadi jernih dan positif. Kajian ini merupakan antitesis bagi perempuan yang mengabaikan kecantikannya sebagai habitus. Kecantikan yang dianggap sebagai sebuah produk dari dominasi Patriarki sejatinya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat eksistensi perempuan dalam dunia karir.²⁵

Keempat, Muhammad Shofin Sugito dan Umdatul Hasanah, “*Pendakwah Perempuan Di Masa Nabi*”, FTK Banten Press, 2016. Sebuah buku yang menjelaskan mulai dari arti dakwah hingga tokoh-tokoh perempuan yang melakukan dakwah di masa Nabi. Dakwah yang merupakan kata serapan dari

²⁴ M. Khamim, “Mursyid Perempuan Dalam Tarekat (Studi Kepemimpinan Perempuan Dalam Tarekat Naqsyabandiyah Mazhariyah Di Madura)” (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019): 1-115. <https://core.ac.uk/download/pdf/199187226.pdf>.

²⁵ B. P. Wahyunintyas, “SPA: Arena Resistensi Wanita Karier Atas Dominasi Patriarki” (Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008): 1-128. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2023-3/120964-T25751-Bernadetta Pravita Wahyunintyas.pdf>.

dari bahasa Arab ini juga memiliki arti positif. Sehingga kata dakwah tidak hanya kata yang dimonopoli oleh Islam melainkan juga digunakan oleh umat agama lainnya. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai kondisi perempuan pra Islam hingga tokoh tokoh perempuan yang berdakwah di masa Nabi berikut peran dakwah yang dilakukan. Di antara mereka ialah Khodijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, Asma binti Abu Yazid, Nusaibah binti Kaab, Ummu Haran binti Milhan, Ummu Sulaim, Ummu Athiyah dan Rufaidah binti Saad. Dalam buku ini yang menjadi sorotan ialah pembahasan mengenai peran perempuan Islam dalam rumah tangga yang dibahas pada sub bab perempuan Islam pada masa Nabi. Dalam rumah tangga, perempuan Islam memiliki tiga peran: sebagai anak, sebagai istri dan sebagai ibu. Dalam penjelasan mengenai peran tersebut secara implisit terlihat bahwa budaya Patriarki masih digunakan dalam Islam. Sebagai gambaran, dalam pembahasan mengenai peran sebagai istri, perempuan memiliki peran sebagai perhiasan suami, pendamping suami, melayani suami dan menaati perintah suami selama bukan termasuk kategori kemaksiatan²⁶.

Kelima, Denna Ritonga, Umdatul Hasanah, Masykur, "Mewujudkan Masyarakat Yang Adil Gender: Penerapan Pengarus Utamaan Gender Di Provinsi Banten", Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018. Dalam laporan penelitian ini memberikan gambaran umum gender di Banten, kesenjangan gender dalam program pembangunan, penyebab ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender serta mewujudkannya. Banten merupakan provinsi pertama yang melahirkan gubernur dari pihak perempuan, selain itu pada tahun 2018, empat dari delapan daerah di provinsi Banten di tempati oleh Perempuan. Empat daerah tersebut adalah kota Tangerang Selatan, kabupaten Serang, kabupaten Lebak dan kabupaten Pandeglang. Kondisi tersebut tidak diiringi oleh kesetaraan dari segi

²⁶ Mohammad Shofin Sugito and Umdatul Hasanah, *Pendakwah Perempuan Di Masa Nabi*, 2016: 1-162.

DPRD, tenaga kerja dan sebagainya. Salah satu penyebab kesenjangan gender tersebut adalah nilai sosial budaya Patriarki.²⁷ Meskipun dalam laporan penelitian ini menyebutkan bahwa masyarakat Banten tidak bisa dilepaskan dari basis keagamaan (h.19-20) namun tidak ada satupun pembahasan dalam sub pembahasan penyebab ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender maupun sub pembahasan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dari sudut pandang agama.

Keenam, Nina Nurmila, “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya”, KARSA Jurnal Sosial dan Kebudayaan Islam, 2015. Kajian ini menjelaskan bagaimana budaya patriarki yang telah mengakar kuat di masyarakat dapat memengaruhi tokoh agama dalam memahami teks keislaman. Tokoh yang mendapatkan banyak sorotan dalam kajian ini adalah Muhammad ibn Umar al Nawawi dengan karyanya *Syarah Uqd al-Lujjain*. Meski kitab tersebut diidentikkan dengan domestikasi perempuan, namun penulis juga memberikan penjelasan sisi positif dari kitab karangan imam Nawawi tersebut. Selain kritikan tersebut, kajian ini juga menjelaskan bahwa agama Islam merupakan agama anti-patriarki. Beberapa pemahaman yang sejati namun tertutupi oleh budaya patriarki mengenai ajaran Islam dalam kajian ini diantaranya sebagai berikut: 1. Perempuan bisa menjadi pemimpin keluarga, 2. Perempuan juga ada yang menjadi Nabi, 3. Islam adalah agama yang anti patriarki.²⁸

Ketujuh, Nanang Hasan Susanto, “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki”, Muwazah, 2015. Menjelaskan bahwa konstruk budaya patriarki yang telah berlangsung lama. Beberapa bentuk ketidakadilan gender yang terwujud dari konstruk budaya patriarki di antaranya

²⁷ Denna Ritonga, Umdatul Hasanah, and Masykur, *Mewujudkan Masyarakat Yang Adil Gender: Penerapan Pengarus Utamaan Gender Di Provinsi Banten* (Serang, 2018): 1-164.

²⁸ Nina Nurmila, “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya,” *KARSA Jurnal Sosial dan Kebudayaan Islam* 23, no. 1 (2015): 1–16, <https://ejournal.iaimadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/606/882>.

adalah marginalisasi perempuan yang berakibat kemiskinan secara ekonomi, subordinasi perempuan, menimbulkan stereotip negatif terhadap perempuan yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi, kekerasan dan baban ganda bagi perempuan. Meski demikian, kesetaraan gender masih dapat diwujudkan walaupun harus melalui proses. Untuk mewujudkan kesetaraan gender maka pendidikan merupakan kunci utama yang harus diselesaikan.²⁹

*Kedelapan, Abraham Nurcahyo, "Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen", Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 2016. Menjelaskan budaya patriarki menjadi faktor perempuan tidak dapat berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan. Budaya patriarki menyebabkan perempuan tidak berdaya baik dengan memendam kesadaran perempuan akan hak-haknya melalui pemberian tanggung jawab peran domestik maupun pembuatan kebijakan pemerintahan yang tidak responsif gender. Dalam pemilu 2009 di Indonesia yang menerapkan keterwakilan perempuan 30%, hanya DPRD Provinsi Maluku dari 33 provinsi yang mencapai target. Sedangkan DPRD Kabupaten/Kota hanya ada 7 kota dari 488 Kabupaten/Kota yang mencapai di atas 30%. Meski demikian, partisipasi perempuan dalam ranah politik cenderung meningkat. Berbagai kebijakan yang berpihak pada perempuan sejak masa reformasi telah dikeluarkan. Peningkatan jumlah anggota dewan perempuan dari periode ke periode masih belum dapat menghilangkan ketidaksetaraan gender, sehingga untuk dapat mewujudkan kesetaraan gender diperlukan juga partisipasi entitas lain yang memiliki *gender sensitivity*.³⁰*

Kesembilan, Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari

²⁹ Nanang Hasan Susanto, "TANTANGAN MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM BUDAYA PATRIARKI," *MUWAZAH* 7 (2) (2015): 120–130.

³⁰ Abraham Nurcahyo, "Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 6, no. 01 (2016): 25.

Perspektif Konflik”, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 2021. Menjelaskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang dialami perempuan melalui perspektif konflik. Perspektif konflik mengkaji hubungan antara distribusi sumber daya yang tidak merata dan perolehan kekuasaan. Teori feminis yang lahir dari perspektif konflik menekankan pada peran dominan laki-laki dalam masyarakat serta hak istimewa dan kekuasaan yang muncul dalam kelompok dominan akibat distribusi sumber daya yang tidak merata. Dengan adanya hak istimewa dan kekuasaan inilah kemudian menimbulkan kesan bahwa laki-laki berhak untuk mendominasi berbagai sektor publik. Dengan demikian, pergerakan perempuan di masyarakat masih terbatas dan sulit mewujudkan hak-hak yang layak bagi perempuan.³¹

Kesepuluh, Mochamad Nadif Nasrullah dan Taufiq Hidayat, “*Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur’an Dan Kesetaraan Gender)*”, YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2022. Menjelaskan bahwa pengetahuan akan korelasi dan hubungan antar ayat merupakan hasil ijtihad seorang *mufassir* dan penghayatannya terhadap Al-Qur’an. Sehingga corak dalam tafsir klasik cenderung mengokohkan budaya patriarki serta memberikan legitimasi kepada suami untuk memberikan peran domestik kepada istri. Sedangkan para pemikir Islam saat ini menghendaki perubahan kearah bilateral yakni parental yang memberikan kesamaan hak baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk menjadi yang terbaik. Sehingga kepemimpinan keluarga dalam Islam bukan berarti otoriter melainkan saling menghargai, menyayangi dan melindungi.³²

³¹ Sarah Apriliandra and Hetty Krisnani, “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 1.

³² Mochamad Nadif Nasrulloh and Taufiq Hidayat, “Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur’an Dan Kesetaraan Gender),” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 139.

H. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa budaya patriarki dianggap sebagai faktor utama hilangnya eksistensi perempuan. Namun di lain sisi terdapat pula penelitian yang menunjukkan perempuan yang tetap dapat bereksistensi meskipun berada di dalam masyarakat dengan budaya Patriarki. Hal serupa juga terjadi dalam memahami ajaran Islam. Di satu sisi ada yang memahami budaya patriarki sesuai dengan ajaran Islam, di lain pihak memahami bahwa ajaran Islam menolak budaya patriarki.

Dengan demikian budaya patriarki menghilangkan atau tidaknya eksistensi perempuan masih merupakan persoalan yang harus diteliti lebih lanjut. Kondisi tersebut seharusnya menempatkan budaya patriarki dalam posisi netral dalam setiap penelitian terkait eksistensi perempuan agar tidak menimbulkan bias penelitian dan mendapatkan pembahasan yang lebih objektif. Selain itu, perihal bagaimana perempuan bereksistensi juga harus memiliki landasan yang tepat dan jelas karena eksistensialisme yang berbeda akan memberikan cara pandang eksistensi yang berbeda pula. Berkenaan dengan itu, budaya patriarki dalam penelitian ini berada sebagai variabel terikat. Sedangkan untuk eksistensialisme dalam penelitian ini akan menggunakan eksistensialisme Muhammad Iqbal yang bercorak teistik.